



KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

2026

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I



DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN
BUDI DAYA

(021) 3519070

humas.kkp@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan 1 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKj triwulanan sebagai salah satu pertanggung jawaban pelaksanaan program/kegiatan APBN 2025 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan penetapan kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen LKj ini dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Penyusunan LKj ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya di tahun selanjutnya. Demikian, semoga dokumen LKj triwulan 1 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Jakarta, 22 April 2026

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
BAB I. PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi.....	3
1.4. Sumberdaya Manusia	5
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya.....	6
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	10
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 DJPB	10
2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
3.2. Analisis Capaian Kinerja	12
SP 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya yang berkelanjutan.....	12
SP 2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudidaya	18
SP 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan Perikanan Budi Daya	19
3.3. Efisiensi.....	22
3.4. Kinerja Anggaran	22
BAB IV. PENUTUP	24
Kesimpulan	24

DAFTAR TABEL

1. Capaian Sasaran Strategis DJPB Triwulan I Tahun 2026	12
2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan I Tahun 2026	16
3. Indeks Konsumsi Rumah Tangga Triwulan I Tahun 2026	16
4. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Triwulan I Tahun 2026.....	17
5. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	20
6. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2026 dan 2025	22
7. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025 dan 2026	23

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya	4
2. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja	5
3. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan.....	6
4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2026	12
5. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026	11
6. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan I Tahun 2026	15
7. Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan I Tahun 2026	17
8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2026	23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini, bagi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya merupakan suatu media informasi pertanggungjawaban terhadap Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pada dasarnya akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah kepada publik merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintahan untuk menjelaskan (*obligation to answer*) kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada Pimpinan. Akuntabilitas ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan keberhasilan ataupun menemukan kelemahan pelaksanaan pembangunan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut telah mengadopsi indikator kinerja utama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Perjanjian Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2026 terdiri dari 3 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan periodik setiap tiga bulan (triwulanan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya.

Capaian kinerja triwulan 1 tahun 2026 secara keseluruhan termasuk berhasil, hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran strategis tercapai secara maksimal yaitu sebesar 100,43%. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya yang menyelenggarakan pembangunan perikanan Budi Daya yang berkelanjutan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan perikanan budi daya yang berkelanjutan.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Renstra DJPB) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DJPB, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dapat di revisi sesuai aturan yang berlaku.

RPJMN 2025 - 2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra K/L 2025-2029.

RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama transformasi Indonesia yang menargetkan kisaran pertumbuhan ekonomi 5,6-6,1 persen dengan Landasan Transformasi diantaranya : (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3) Transformasi Tata Kelola, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya diperlukan Renstra DJPB Tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada Renstra KKP. Renstra ini merupakan dokumen yang menjabarkan kebijakan dan optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budi daya untuk meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional serta peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Dokumen ini akan menjadi acuan pembangunan perikanan budi daya dalam lima tahun ke depan bagi pemangku kepentingan perikanan budi daya dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Kementerian/Lembaga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, pelaku usaha, asosiasi, praktisi dan akademisi. Renstra ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

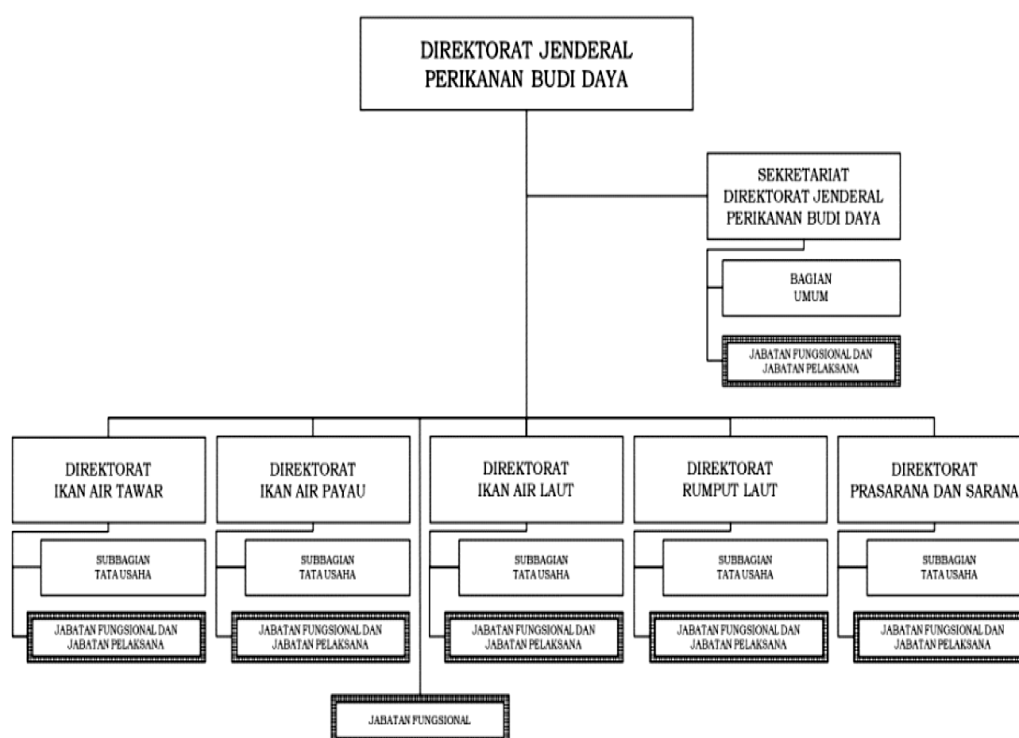
1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran DJPB selama priode triwulan I Tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKj Triwulan I ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi proses pencapaian kinerja dan sasaran Ditjen Perikanan Budi daya Tahun 2025.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan Budi Daya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: i) perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; ii) pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; iii) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; iv) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; v)

pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan; vi) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan vii) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya

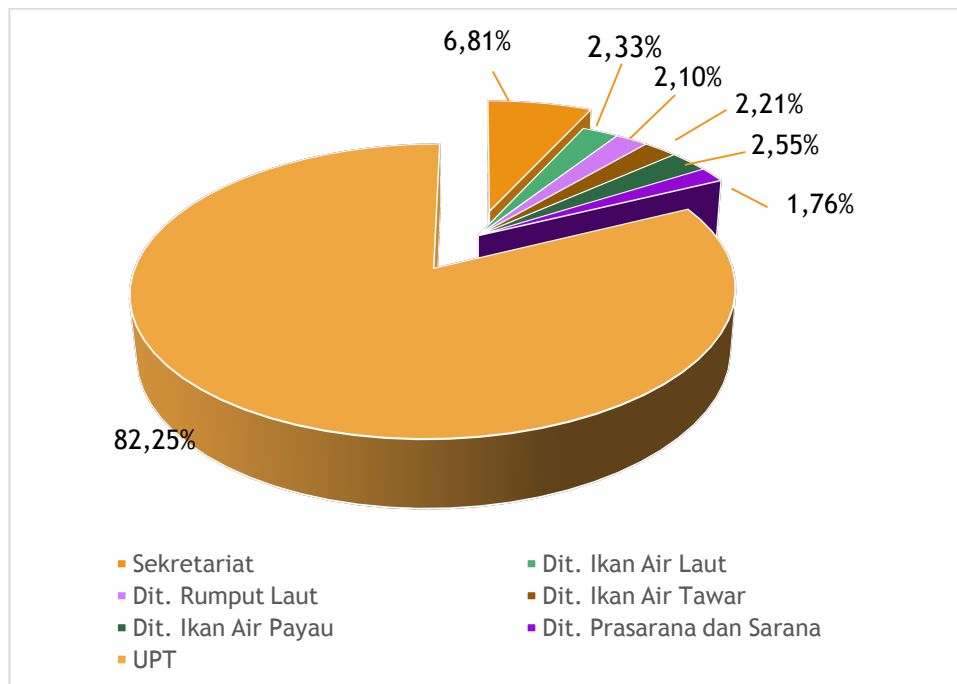
Selain itu DJPB juga mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya meliputi:

1. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi
2. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara
3. Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung
4. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Mandingain
5. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu

6. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Sungai Gelam
7. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo
8. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
9. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
10. Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam
11. Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
12. Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
13. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem
14. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang
15. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang

1.4. Sumberdaya Manusia

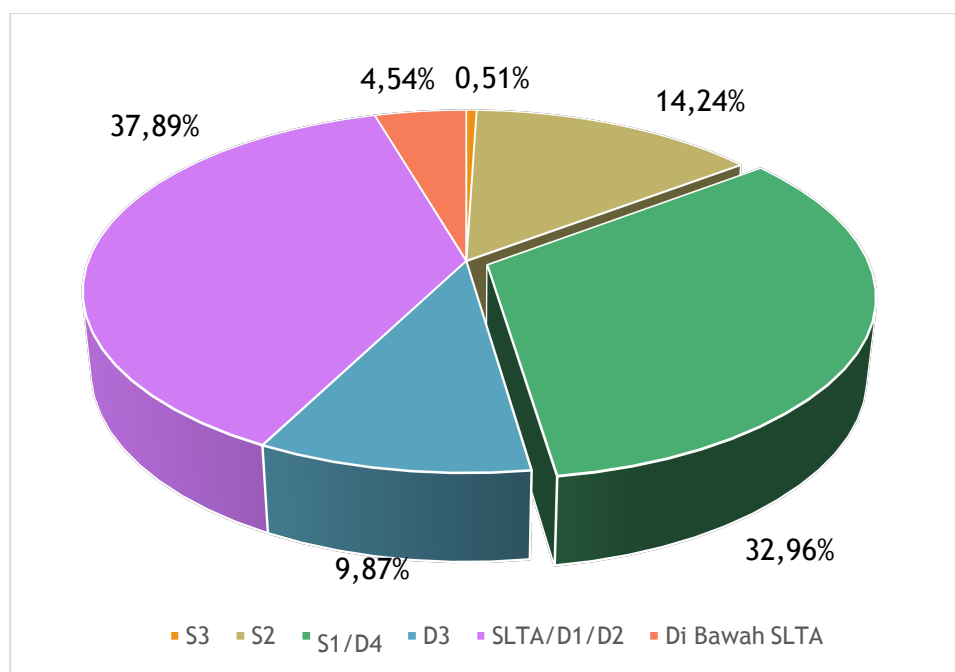
Jumlah pegawai DJPB (Pusat dan UPT) Triwulan I Tahun 2026 adalah 1.763 orang. Pegawai DJPB tersebut tersebar pada 5 unit kerja eselon II dan 15 UPT dengan komposisi sebagai berikut : (i) Sekretariat sejumlah 120 orang (6,81%); (ii) Direktorat Ikan Air Laut sejumlah 41 orang (2,33%); (iii) Direktorat Rumput Laut sejumlah 37 orang (2,10%); (iv) Direktorat Ikan Air Tawar sejumlah 39 orang (2,21%) (v) Direktorat Ikan Air Payau sejumlah 45 orang (2,55%); dan (vi) Unit Pelaksana Teknis sejumlah 1.450 Orang (82,25%).



Gambar 2. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut: (i) S-3 sejumlah 9 orang (0,51%); (ii) S-2 sejumlah 251 orang

(14,24%); (iii) S-1/D-IV sejumlah 581 orang (32,96%); (iv) D-III sejumlah 174 orang (9,87%); (v) SLTA/D1/D2 sejumlah 668 orang (37,89%); dan (vi) di bawah SLTA sejumlah 80 orang (4,54%).



Gambar 3. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan tingkat pendidikan

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km dan luas laut mencapai 6,4 juta km². Wilayah daratannya yang kaya akan sungai, danau, waduk, serta persawahan memberikan peluang besar bagi pengembangan perikanan budi daya baik di air tawar, payau, maupun laut (KKP, 2024). Berdasarkan data FAO (2023), Indonesia merupakan produsen perikanan budi daya terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) .

Produksi perikanan budi daya nasional pada tahun 2024 mencapai 24,85 juta ton , menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,65% per tahun selama periode 2020–2024. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budi daya global yang berada di kisaran 21% per tahun , menurut proyeksi FAO (2023).

Komoditas perikanan budi daya di Indonesia sangat beragam, dengan kurang lebih 30 jenis ikan dan biota air lainnya yang dikembangkan secara komersial. Dari jumlah tersebut, 12 komoditas utama ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan perikanan budi daya, yaitu: Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*), Kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*), Kakap merah (*Lutjanus sp.*), Bandeng (*Chanos chanos*), Patin (*Pangasius sp.*), Nila (*Oreochromis*

niloticus), Ikan mas (*Cyprinus carpio*), Lele dumbo (*Clarias gariepinus*), Gurame (*Osphronemus goramy*), Rumput laut (*Eucheuma sp.* , *Gracilaria sp.* , *Sargassum sp.*), Ikan hias (Arwana, Cupang, Oscar, dll.), dan Kepiting bakau (*Scylla serrata*).

Luas lahan potensial untuk pengembangan perikanan budi daya di Indonesia mencakup wilayah darat, pesisir, dan laut lepas, antara lain: Budidaya air tawar meliputi kolam tanah, kolam beton, keramba jaring apung (KJA) di waduk, danau, dan sungai, dengan total luasan mencapai lebih dari 1,5 juta hektare . Budidaya air payau : tambak tradisional dan intensif di kawasan pesisir, dengan luas potensial mencapai 2,1 juta hektare , meskipun baru sekitar 1,2 juta hektare yang dimanfaatkan secara aktif. Budidaya laut : meliputi keramba jaring apung laut (KJAL), rumput laut, mutiara, dan budidaya kepiting/lobster di laut, dengan potensi ruang laut yang dapat dialokasikan mencapai 12 juta hektare (KKP, 2024).

Selain itu, model integrasi seperti mina padi (padi-ikan) di areal persawahan menjadi alternatif pengembangan budi daya di lahan pertanian dengan sistem pertanian terpadu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (2023), luas sawah di Indonesia mencapai sekitar 7,4 juta hektare , dengan potensi pemanfaatan sebagian untuk mina padi.

Subsektor perikanan budi daya juga memiliki kontribusi signifikan dalam perdagangan internasional. Nilai ekspor produk perikanan budi daya pada tahun 2024 mencapai USD 5,2 miliar , didominasi oleh udang vaname, rumput laut, dan ikan hias. Indonesia saat ini menduduki posisi kedua pengekspor ikan hias terbesar di dunia, setelah Singapura, menurut data Trademap (2023).

Dengan meningkatnya permintaan global akan produk pangan asal laut yang berkelanjutan, serta dukungan kebijakan nasional dalam pengembangan ekonomi biru, potensi pengembangan perikanan budi daya Indonesia masih sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui pendekatan inovatif, teknologi tepat guna, dan regulasi yang kondusif.

PERMASALAHAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan budidaya yang besar, masih menghadapi sejumlah kendala struktural yang menghambat pertumbuhan sektor ini. Berdasarkan data terbaru hingga 2024, berikut rangkuman tantangan beserta dampaknya:

Keterbatasan Distribusi Induk dan Benih Bermutu

Ketersediaan induk dan benih unggul (SPF) masih menjadi masalah krusial. Saat ini, 70% benih udang vannamei diimpor dari Thailand, Vietnam, dan Filipina, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 30% kebutuhan nasional (KKP, 2023). Bahkan, Broodstock Center di Bali dan Aceh yang bertujuan mengurangi ketergantungan impor baru mampu memproduksi 1 miliar benur/tahun , jauh dari target 3 miliar benur pada 2024. Keterbatasan akses benih berkualitas ini menyebabkan petani di daerah terpencil terpaksa menggunakan benih lokal rentan penyakit, berisiko menurunkan produktivitas hingga 50% (AEPUDI, 2023).

Tingginya Biaya Pakan

Biaya pakan mendominasi 60–70% dari total biaya produksi budidaya (FAO, 2022). Ketergantungan pada impor bahan baku seperti tepung ikan dan minyak nabati menyebabkan nilai impor pakan mencapai USD 1,2 miliar/tahun (BPS, 2023). Akibatnya, banyak petani kecil beralih ke pakan murah dengan kualitas rendah (Rp 8.000–10.000/kg), yang mengandung protein di bawah standar. Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ikan/udang tetapi juga meningkatkan risiko pencemaran air akibat limbah pakan (BRIN, 2023).

Daya Cerna Nutrisi Tidak Optimal

Efisiensi pakan di tambak tradisional masih rendah, dengan rata-rata FCR (rasio konversi pakan) mencapai 2,5–3,0, jauh lebih tinggi dibandingkan sistem modern (1,2–1,5) (LIPI, 2023). Ketidakefisienan ini menyebabkan pemborosan pakan hingga Rp 2,5 triliun/tahun dan peningkatan limbah organik yang merusak kualitas air (KKP, 2022).

Serangan Hama dan Penyakit

Penyakit seperti *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) dan *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) menyebabkan 30–40% produksi udang gagal panen setiap tahun (AEPUDI, 2023). Di Jawa Timur, 20% tambak udang terinfeksi EHP pada 2023, mengakibatkan kerugian hingga Rp 500 miliar (Dinas Perikanan Jatim, 2023). Sistem biosekuriti yang lemah dan perubahan iklim semakin memperparah risiko penyebaran penyakit.

Pencemaran Lingkungan

80% limbah tambak (pakan sisa, kotoran ikan) tidak dikelola, menyebabkan peningkatan kadar amonia hingga 1,5–2,0 mg/liter (melebihi ambang aman) dan sedimentasi di pesisir (KLHK, 2023). Penggunaan antibiotik dan pestisida berlebihan juga memicu resistensi mikroba, mengancam kelestarian ekosistem akuatik.

Perubahan Parameter Lingkungan

Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu air laut rata-rata 0,5–1,0°C dalam 10 tahun terakhir, memicu stres pada udang dan menurunkan imunitas (BMKG, 2023). Di Aceh, 25% tambak gagal panen akibat fluktuasi salinitas pasca-tsunami (Universitas Syiah Kuala, 2023). Kondisi ini diperparah oleh pencemaran dari aktivitas industri di sekitar kawasan tambak.

Lemahnya Pengendalian Tata Ruang

Alih fungsi lahan tambak yang tidak terkendali menyebabkan 1,5 juta hektare lahan tumpang tindih dengan kawasan mangrove atau permukiman (KLHK, 2023). Konversi mangrove menjadi tambak telah merusak 2,5 juta hektare hutan bakau sejak 1980-an, menghilangkan fungsi ekosistem sebagai penyangga alami (Kementerian LHK, 2022).

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Budi Daya triwulan I Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya selama kurun waktu Januari-Maret 2025.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2025 – 2029, rencana kerja dan anggaran tahun 2025, penetapan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja (IK) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta evaluasi dan analisis kinerja selama triwulan I Tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 DJPB

VISI

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2025-2029 sejalan dengan Visi Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 3 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

“Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan Misi Asta Cita 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

“Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan Misi Asta Cita 5, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjalankan Misi ke-2 yaitu “Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan”

TUJUAN

Tujuan pembangunan perikanan budi daya tahun 2025 – 2029 meliputi :

1. Meningkatnya produktivitas sektor perikanan budi daya
2. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai suatu hasil dan dampak (outcome) dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran strategis (SS) DJPB tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

SS 1. Meningkatnya produksi perikanan Budi Daya yang berkelanjutan

SS 2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya produksi perikanan Budi Daya yang berkelanjutan dengan indikator kinerja :

1. Volume Produksi Ikan Budi Daya (Juta Ton) 6,75 di 2025 dan 8,52 di 2029
2. Volume Produksi Rumput Laut (Juta Ton) 11,64 di 2025 dan 14,14 di 2029

Sasaran Strategis ke-dua (SS-2). Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengelolaan Perikanan Budi Daya dengan Indikator Kinerja :

1. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai) 86 di 2025 dan 88 di 2029;

Penetapan Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
 Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik
Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik
Tb. Haeru Rahayu

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya Secara Berkelanjutan	1. Volume Produksi Ikan Budi Daya (juta ton)	7,15
	2. Volume Produksi Rumput Laut (juta ton)	12,22
	3. Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi) (nilai)	103,50
2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudidaya	4. Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)	3
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	5. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (nilai)	86,5

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	820.116.276.000
	a. Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	
	b. Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	
	c. Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	
2.	d. Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	335.753.122.000
	Program Dukungan Manajemen	
Total Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2026		1.155.869.398.000

Jakarta, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik
Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



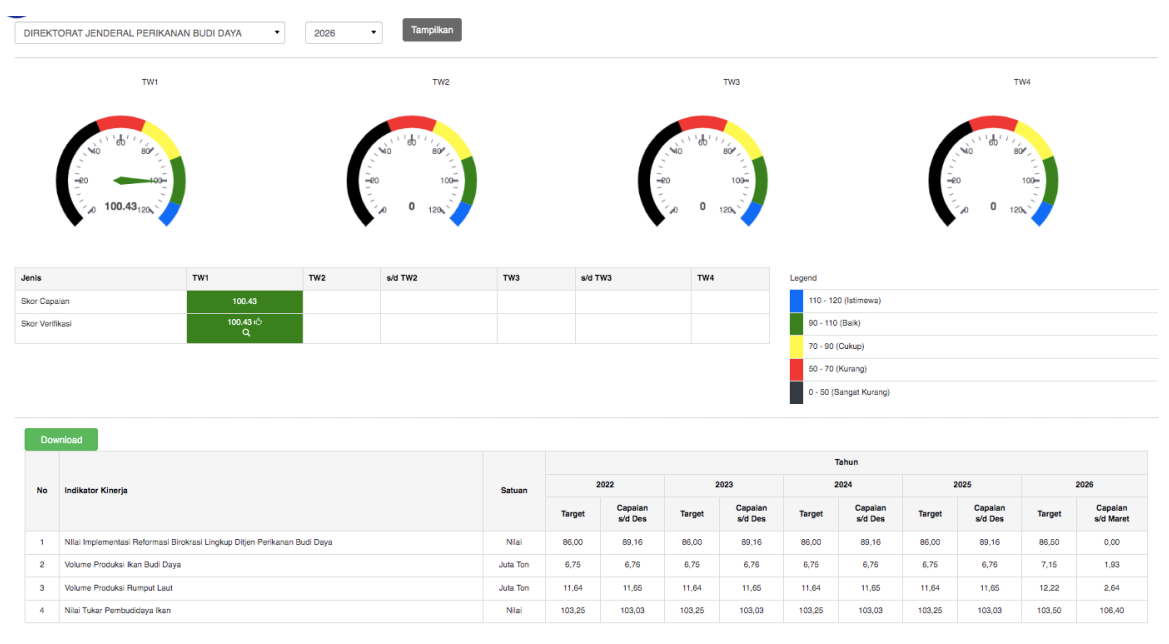
Ditandatangani
Secara Elektronik
Tb. Haeru Rahayu

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2026

2.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemementasi Aplikasi "Kinerjaku", berikut capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada triwulan I Tahun 2026.



Gambar 5. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan Budi Daya pada tahun 2026 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada enam Sasaran Strategis dengan dua puluh empat Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat tiga indikator yang dapat diukur capaiannya pada triwulan satu sedangkan dua indikator lainnya diukur tahunan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Triwulan I Tahun 2026 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis DJPB Triwulan I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET TW.I	REALISASI	%
1	Volume Produksi Ikan Budi Daya	7,15	2,05	1,93	94,15
2	Volume Produksi Rumput Laut	12,22	2,53	2,64	104,35
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	103,50	103,50	106,40	102,80
4	Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)	3	-	-	-
5	Nilai Implementasi refomasi birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	86	-	-	-

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

SP 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya yang berkelanjutan

Sasaran Program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya produksi Perikanan Budi Daya yang berkelanjutan dengan indikator kinerja :

IK 1. Volume Produksi Ikan Budi Daya

SP 1. Meningkatnya produksi perikanan Budi Daya yang berkelanjutan							
IKU 1 : Volume Produksi Ikan Budi Daya(juta Ekor)							
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2024- TW I Tahun 2025
R		T		R	% thd target Thn	% thd target trwln	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	Tw I	TW I			
1,89	3,94	7,15	2,05	1,93	26,99	94,15	2,11-

Pada triwulan 1 tahun 2026, sektor **Ikan Budidaya** menunjukkan pencapaian yang bervariasi. Target nasional untuk produksi ikan budidaya pada tahun 2026 adalah 5.802.000 ton, dengan target triwulan I sebesar 1.670.443 ton. Capaian produksi ikan pada triwulan I tercatat mencapai 1.616.360 ton, yang berarti tercapai 96,8% dari target triwulan I. Meskipun demikian, beberapa komoditas utama, seperti **Udang**, **Kakap**, dan **Ikan Mas**, mengalami kekurangan dalam capaian target produksi.

1. **Udang**: Target produksi udang pada triwulan I adalah 381.889 ton, namun capaian yang tercatat hanya 314.402 ton, dengan selisih -67.487 ton atau sekitar 82,3% dari target.
2. **Kakap**: Target produksi kakap adalah 2.315 ton, namun hanya tercapai 1.698 ton, yang berarti hanya mencapai 73,3% dari target.
3. **Ikan Mas**: Target produksi ikan mas pada triwulan I adalah 204.814 ton, tetapi capaian yang tercatat hanya 184.333 ton, dengan selisih -20.481 ton atau 89,9% dari target.

Namun, meskipun ada penurunan hasil pada komoditas-komoditas tersebut, faktor permintaan yang tinggi pada bulan **Ramadhan** dan **Idul Fitri** menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi pada triwulan II. Selama bulan Ramadhan, konsumsi ikan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri pengolahan makanan, cenderung meningkat. Permintaan pasar yang tinggi, ditambah dengan keberlanjutan tren konsumsi pasca-Idul Fitri, memberi potensi yang kuat bagi pembudidaya ikan untuk menggenjot hasil produksi guna memenuhi kebutuhan pasar.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah **kenaikan harga input produksi**, terutama pakan ikan dan obat-obatan, yang dapat mempengaruhi biaya produksi. **Harga bahan bakar** juga menjadi faktor kritis, karena pengangkutan dan distribusi hasil budidaya sangat bergantung pada kestabilan harga bahan bakar. Kenaikan harga bahan bakar yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik, khususnya perang di **Timur Tengah**, dapat meningkatkan biaya operasional dan berdampak pada margin keuntungan pembudidaya.

Jika faktor-faktor eksternal ini dapat dikelola dengan baik, terutama melalui kebijakan mitigasi atau dukungan subsidi dari pemerintah untuk menstabilkan harga bahan baku dan bahan bakar, maka sektor ikan budidaya masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan hasil pada triwulan II. Selain itu, inovasi teknologi dalam proses budidaya ikan dan distribusi yang lebih efisien akan membantu meningkatkan hasil produksi yang lebih optimal

IK 2. Volume Produksi Rumput Laut

SP 1. Meningkatnya produksi perikanan Budi Daya yang berkelanjutan							
IKU 2 : Volume produksi rumput laut (juta ton)							
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2025-TW I Tahun 2026
R		T		R	% thd target Thn	% thd target trwln	
TW I	Tahunan	Tahunan	Tw I	TW I			
2,29	11,65	12,22	2,53	2,64	21,60	104,35	4,34

Sektor **Rumput Laut** menunjukkan pencapaian yang sangat menggembirakan pada triwulan 1 tahun 2026. Target produksi rumput laut pada tahun 2026 adalah 12.222.000 ton, dengan target triwulan I sebesar 2.531.214 ton. Capaian produksi pada triwulan I tercatat mencapai 2.636.537 ton, yang berarti melampaui target dengan selisih +105.323 ton, atau sekitar 104,2% dari target.

Pencapaian yang melebihi target ini dapat diatribusikan pada **tingginya permintaan pasar** baik domestik maupun internasional, yang mendorong sektor rumput laut untuk memproduksi lebih tinggi. Sektor rumput laut juga terbukti lebih resilient terhadap tantangan eksternal, seperti bencana alam, karena rumput laut cenderung lebih mudah ditanam dan dipanen, serta memiliki pasar yang stabil.

Namun, meskipun capaian ini sangat positif, sektor rumput laut tetap menghadapi potensi risiko yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah **kenaikan harga bahan bakar**, yang bisa mempengaruhi biaya distribusi rumput laut, terutama dalam pengiriman ke pasar internasional. Rumput laut membutuhkan distribusi yang cepat dan efisien, dan kenaikan harga bahan bakar dapat meningkatkan biaya logistik secara signifikan. Selain itu, **kenaikan harga input produksi**, seperti pupuk dan perlengkapan budidaya, dapat berdampak pada biaya operasional produksi rumput laut.

Untuk mempertahankan pencapaian yang positif pada triwulan II, sektor rumput laut perlu memanfaatkan peluang-peluang pasar yang ada, baik dengan memperkuat hubungan dengan pasar ekspor maupun meningkatkan inovasi produk berbasis rumput laut yang bernilai tambah. Dengan mengoptimalkan teknologi budidaya dan pengolahan, sektor rumput laut dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan hasil produksinya, meskipun terdapat tekanan dari sisi biaya produksi.

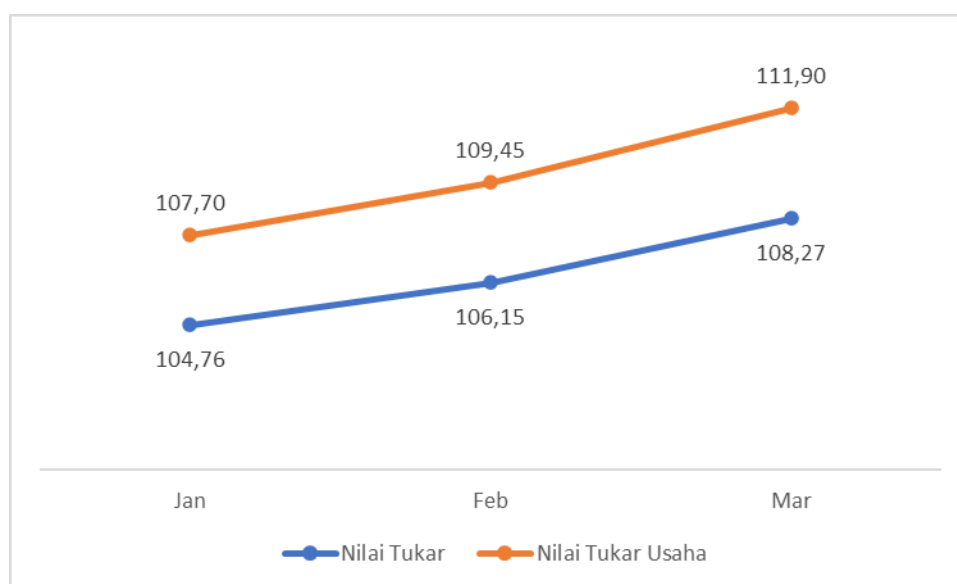
IK 3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

SP 1. Meningkatnya produksi perikanan Budi Daya yang berkelanjutan							
IKU 3 : Nilai Tukar Pembudidaya Ikan							
2025		2026					% Pertumbuhan TW I Tahun 2024- TW I Tahun 2025
R		T		R	% thd target Thn	% thd target trwln	
TW I	Tahun 2025	Tahunan	Tw I	TW I			
-	103,03	103,50	103,50	106,40	103,50	103,50	3,5

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). NTPi merupakan indikator tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya ikan, nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus (kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi/biaya produksi), nilai tukar sama dengan 100 berarti

pembudidaya mengalami impas, dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami defisit.

Metode penghitungan nilai tukar pembudidaya ikan menggunakan formulasi laspeyres. nilai tukar pembudidaya ikan didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima pembudidaya ikan (I_t) dengan harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (I_b). Sementara nilai tukar usaha pembudidaya ikan didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima pembudidaya ikan (I_t) dengan harga dibayar untuk biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).



Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I tahun 2026, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Nasional rata-rata sebesar 106,40. Angka ini menunjukkan bahwa daya tukar pembudidaya ikan dari hasil budidayanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami surplus. Sementara itu, rata-rata Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPI) Nasional tercatat sebesar 109,69, yang artinya usaha perikanan budidaya secara umum memberikan keuntungan bagi pembudidayanya di atas biaya produksinya.

Pertumbuhan NTPi Nasional mengalami tren kenaikan selama Januari - Maret 2026 dengan kenaikan rata-rata sebesar 1,65 persen per bulan. Begitupun dengan NTUPI-nya yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,81 persen per bulannya, sebagaimana tergambar pada grafik di atas.

Kenaikan nilai ini sangat sejalan dengan naiknya Indeks Harga yang Diterima oleh pembudidaya (I_t) yang cukup signifikan. Walaupun Indeks Dibayar oleh pembudidaya (I_b) maupun Indeks BPPBM mengalami kenaikan pula, namun persentase kenaikannya tidak lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang diterima, sehingga menghasilkan rasio nilai tukar yang semakin membaik.

Tabel 2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan I Tahun 2026

Komponen NTPi		NTPi			Rata-rata Triwulan I	Kenaikan Rata-rata (%)
		Jan	Feb	Mar		
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104,76	106,15	108,27	106,40	1,65%
	Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan	107,70	109,45	111,90	109,69	1,91%
a	Indeks Harga yang diterima pembudidaya ikan (It)	128,98	131,41	134,54	131,64	2,11%
	- Budidaya air tawar	119,25	120,71	122,97	120,98	1,53%
	- Budidaya laut	122,79	119,02	119,84	120,55	-1,13%
	- Budidaya Air Payau	130,56	133,90	136,64	133,70	2,27%
b	Indeks harga yang dibayar pembudidaya (Ib)	123,11	123,80	124,26	123,72	0,46%
	- Indeks konsumsi rumah tangga	126,65	127,83	128,61	127,70	0,77%
	- Indeks BPPBM	119,75	120,07	120,23	120,02	0,20%

Jika dilihat dari komponen penyusun It, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa secara umum mengalami kenaikan dengan kenaikan rata-rata sebesar 2,11% per bulan. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas Budidaya Air Payau (2,27% per bulan), diikuti Budidaya Air Tawar (1,53% per bulan). Sebaliknya, Budidaya Laut justru mengalami penurunan indeks harga rata-rata (-1,13% per bulan), terutama karena penurunan drastis harga di bulan Februari.

Sementara Ib mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,46 persen per bulan. Komponen penyusun Ib terdiri dari indeks konsumsi rumah tangga (KRT) dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM). Secara rata-rata selama triwulan I tahun 2026, kedua komponen indeks biaya tersebut mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,77 persen per bulan dan 0,20 persen per bulan. Naiknya Ib ini disebabkan terutama oleh naiknya harga konsumsi rumah tangga.

Tabel 3. Indeks Konsumsi Rumah Tangga Triwulan I Tahun 2026

Komponen NTPi		Indeks Harga			Rata-rata Triwulan I	Kenaikan Rata-rata (%)
		Jan	Feb	Mar		
	Konsumsi Rumah Tangga	126,65	127,83	128,61	127,70	0,77%
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	132,56	134,59	135,65	134,27	1,15%
2	Pakaian Dan Alas Kaki	127,86	128,23	129,69	128,59	0,71%
3	Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	110,78	110,90	111,10	110,93	0,14%
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	121,43	121,57	121,77	121,59	0,14%
5	Kesehatan	119,73	119,87	119,93	119,84	0,08%
6	Transportasi	121,24	120,66	121,43	121,11	0,10%
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	103,99	104,02	104,05	104,02	0,03%
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	119,60	119,67	119,75	119,67	0,06%
9	Pendidikan	106,54	106,55	106,55	106,55	0,00%
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	119,42	119,60	119,75	119,59	0,14%
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	138,17	140,26	140,60	139,68	0,87%

Kenaikan indeks konsumsi tertinggi selama triwulan I adalah Makanan, Minuman dan Tembakau dengan kenaikan rata-rata sebesar 1,15 persen per bulannya. Komponen ini adalah kebutuhan dasar setiap rumah tangga sehingga naiknya harga, tetap menjadi prioritas bagi pembudidaya untuk dibeli. Kenaikan tertinggi selanjutnya adalah indeks Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,87 persen. Indeks Pakaian Dan Alas Kaki mengalami kenaikan rata-rata per bulan sebesar 0,71 persen dan merupakan komponen indeks konsumsi rumah tangga tertinggi ketiga. Sektor pendidikan tercatat stabil.

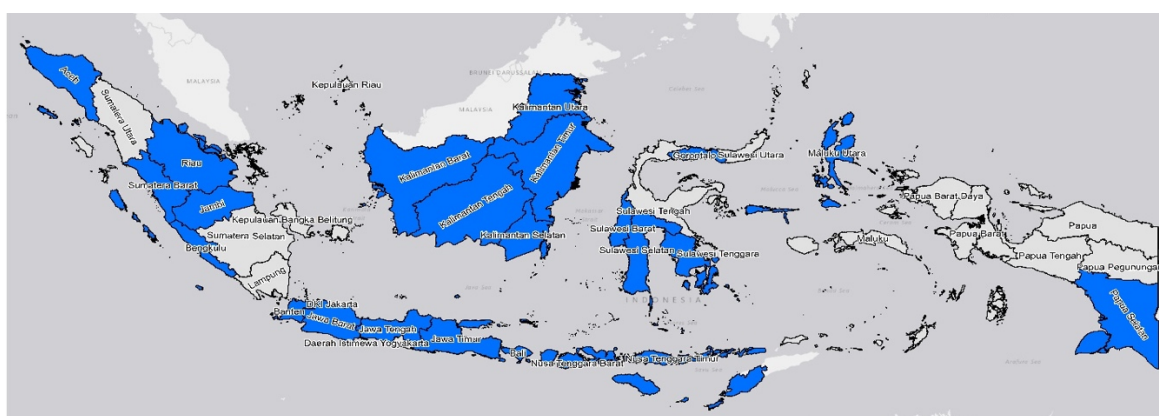
Indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) yang dipantau harganya dengan menggunakan tahun dasar 2018 adalah bibit/benih, pupuk, pakan, obat-obatan, transportasi, komunikasi, barang modal, sewa dan pengeluaran lainnya. Hasil dari pendataan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Triwulan I Tahun 2026

	Komponen NTPI	Indeks Harga			Rata-rata Triwulan I	Kenaikan Rata-rata (%)
		Jan	Feb	Mar		
	BPPBM	119,75	120,07	120,23	120,02	0,20%
1	Bibit/Benih	119,73	120,46	120,82	120,34	0,45%
2	Pupuk, Obat-Obatan, Dan Pakan Ikan	123,18	123,47	123,50	123,38	0,13%
3	Sewa Dan Pengeluaran Lainnya	105,89	106,02	106,06	105,99	0,08%
4	Transportasi Dan Komunikasi	123,35	122,96	123,65	123,32	0,14%
5	Barang Modal	110,09	110,17	110,21	110,16	0,05%
6	Upah Buruh	117,91	117,99	118,14	118,02	0,10%

Indeks BPPBM yang mengalami kenaikan tertinggi berturut-turut adalah Bibit/Benih (0,45 persen), Transportasi Dan Komunikasi (0,14 persen), dan Pupuk, Obat-Obatan, Dan Pakan Ikan (0,13 persen). Kenaikan indeks harga benih tertinggi di antara komponen BPPBM lainnya, hal ini dimungkinkan karena kenaikan permintaan atau keterbatasan suplai benih berkualitas. Sementara naiknya harga pupuk dan pakan dimungkinkan adanya pengaruh faktor eksternal pada bahan baku. Komponen Barang Modal tercatat memiliki kenaikan paling rendah.

Berdasarkan wilayahnya pada triwulan I tahun 2026 terdapat 22 provinsi yang indeks NTPI-nya di atas 100 seperti pada gambar di bawah yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua, dan Papua Selatan. NTPI tertinggi pada triwulan I ini adalah provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai sebesar 116,82 dan NTPI terendah provinsi Kepulauan Riau sebesar 87,81.



Gambar 7. Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Triwulan I Tahun 2026

Peningkatan indeks NTPI yang positif secara Nasional merupakan indikator baik bagi kesejahteraan pembudidaya. Sesuai dengan rumusnya, peningkatan ini dapat dipertahankan

dan ditingkatkan melalui strategi dua arah: (1) Meningkatkan Indeks yang Diterima (It) dengan menjaga stabilitas dan menaikkan harga di tingkat pembudidaya (misalnya melalui perbaikan akses pasar dan rantai dingin), dan (2) Menekan Indeks yang Dibayar (Ib), khususnya biaya produksi. Karena komponen Bibit/Benih dan Pupuk/Pakan memiliki pengaruh yang signifikan dan dapat diintervensi, upaya pengendalian harga dan suplai kedua komponen ini menjadi krusial.

Faktor-faktor lain seperti tingkat produktivitas, ketersediaan sarana prasarana, dan dukungan infrastruktur juga sangat mempengaruhi dinamika nilai tukar ini.

Oleh karenanya, rencana aksi yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan pihak terkait untuk keberlanjutan tren positif NTPi antara lain:

1. Pengembangan pakan mandiri dan pakan alami guna menekan biaya pakan yang tinggi dan fluktuatif.
2. Bantuan bibit/benih berkualitas dan pembuatan sistem logistik benih yang memadai dan efisien untuk meminimalisasi lonjakan harga benih ikan.
3. Pengembangan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi di berbagai ekosistem (air tawar, payau, laut) untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil budidaya.
4. Inovasi, diseminasi, dan pendampingan teknologi budidaya yang modern dan berkelanjutan kepada pembudidaya untuk meningkatkan efisiensi usaha.

Kolaborasi lintas sektor, misalnya dengan Ditjen Penguatan Daya Saing untuk ketersediaan pasar dan hilirisasi produk, serta sinergi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam pembangunan infrastruktur pendukung (seperti transportasi dan komunikasi).

SP 2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudidaya

Sasaran Program ke-dua (SP-2) yang akan dicapai adalah: Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudidaya, dengan indikator kinerja:

IK 3. Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan ikan yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya

SP 2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudidaya ikan							
IKU 4 : kumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya							
2025		2026				% Pertumbuhan TW I Tahun 2024- TW I Tahun 2025	
R		T		R	% thd target Thn		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	Tw I	TW I		% thd target trwln	
-	-	-	-	-		-	-

Peningkatan usaha petani dan nelayan termasuk Pembudi Daya Ikan dilakukan dengan cara mendorong terjadinya peningkatan skala ekonomi kecil untuk bergabung dan berkolaborasi

melalui kelompok atau korporasi besar. Dengan demikian, diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan skala ekonomi yang besar pula.

Bentuk peningkatan usaha petani dan nelayan tersebut melalui Korporasi. Korporasi Pembudi Daya Ikan oleh karenanya dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha (agribisnis) yang meliputi usaha hulu hingga hilir yang dijalankan bersama oleh pembudi daya ikan dalam bentuk usaha ekonomi yang berbadan hukum dimana sebagian besar kepemilikan modal dimiliki Pembudi Daya Ikan.

Peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan sebagai implementasi kegiatan korporasi pada periode Triwulan 1 tahun 2026 ini memasuki tahapan pengumpulan data yang kegiatannya dielaborasi dengan kegiatan lain di antaranya kegiatan budidaya ikan tematik bioflok dan minapadi. Melalui kegiatan tematik bioflok dan minapadi tersebut diharapkan dapat diperoleh daftar nominatif kelompok pembudidaya ikan yang dapat ditingkatkan menuju level korporasi. Daftar nominatif ini diharapkan dapat diproses lebih lanjut untuk capaian kegiatan korporasi pada tri wulan berikutnya.

SP 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan Perikanan Budi Daya

Sasaran Program ke-tiga (SP-3) yang akan dicapai adalah: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan Perikanan Budi Daya, dengan Indikator Kinerja:

IK 1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) DJPB

SP 3. Tata kelola pemerinttahan yang efektif dan akuntable dalam pengelolaan perikanan Budi Daya							
IKU 5 : Indeks Reformasi Birokrasi (Rb) DJPB							
2025		2026				% Pertumbuhan TW I Tahun 2024- TW I Tahun 2025	
R		T		R	% thd target Thn		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	Tw I	TW I		% thd target trwln	
-	89,16	-	-	-		-	-

Definisi Indikator Kinerja

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tiga hal utama yaitu: (1) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, (2) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), (3) serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Nilai kinerja RB KKP merupakan ukuran perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi di KKP yang dilaksanakan berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan PermenPANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang *Roadmap* RB, PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182

Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokras, dan KepmenKP 166 Tahun 2023 tentang *Roadmap* RB KKP 2020-2024. Komponen RB K/L dibagi menjadi 2 dimensi yaitu dimensi RB general dan RB tematik. Dimensi RB General (bobot 100) terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Komponen capaian strategi pelaksanaan RB general (bobot 10), terdiri atas subkomponen kualitas rencana aksi dan subkomponen implementasi rencana aksi,
2. Komponen capaian implementasi kebijakan RB (bobot 40), diukur dengan 18 indikator dan Capaian sasaran strategis (bobot 50), diukur dengan 7 indikator.

Sedangkan dimensi RB tematik (bobot 10) terdiri atas komponen capaian RB tematik (bobot 10), diukur dengan 5 indikator yaitu Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting. Pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan dengan berdasarkan pada :

- a. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- b. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi		
Kategori	Nilai	Predikat
AA	>100	Sangat Memuaskan
A	>80-100	Memuaskan
A-		Memuaskan dengan Catatan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Analisa Capaian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024,

Evaluators Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif. Target Indeks RB Tahun 2025 ditargetkan 86 dengan capaiannya bersifat tahunan sehingga belum terdapat capaian di Triwulan I Tahun 2025.

Meskipun Indeks RB Tahun 2024 bersifat tahunan, sehingga belum terdapat capaian di Triwulan I Tahun 2025. Saat ini KKP tengah menunggu penetapan grand design reformasi birokrasi nasional dan roadmap reformasi birokrasi nasional 2025-2029 sebagai pedoman penyusunan Roadmap RB KKP Tahun 2025 – 2029. Pada tanggal 27 Februari 2025, Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah mengirimkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 409/SJ.3/OT.730/II/2025, hal Penyampaian Nilai RB Sementara dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Menindaklanjuti nota dinas tersebut, telah dilaksanakan rapat penyusunan rencana aksi RB General dan RB Tematik. Konsep rencana aksi tersebut telah dievaluasi oleh Tim Evaluator Internal dan Pada tanggal 25 Maret 2025, telah dikeluarkan surat Inspektur Jenderal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor : B.96/ITJ/HP.450/III/2025, hal Hasil Evaluasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor B.81/ITJ.4/KP.440/III/2025, tanggal 13 Maret 2025, Evaluator Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan evaluasi penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025. Tujuan evaluasi untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan rencana aksi RB General dan Tematik tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan dan memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi. Ruang lingkup evaluasi meliputi Rencana Aksi General dan Tematik Tahun 2025. Berdasarkan evaluasi disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud komitmen dalam penyelenggaraan RB di lingkungan KKP yang berdampak kepada stakeholder, Pimpinan pada unit kerja Eselon I di lingkungan KKP telah menetapkan nilai RB KKP sebagai Indikator Kinerja Utama.
- b. Terdapat target rencana aksi yang memerlukan penyesuaian kembali, disebabkan target yang ditetapkan lebih rendah dari baseline hasil penilaian Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut:

Rencana Aksi (Upaya) Peningkatan Capaian Kedepan Berkoordinasi secara tertulis dengan seluruh Penanggung Jawab RB untuk memperbaiki rencana aksi perihal penetapan target rencana aksi dengan nilai sama dengan atau lebih tinggi dari hasil penilaian RB Tahun 2024; penyesuaian rencana anggaran dengan besaran pada RKA-KL sebelum efisiensi; penyesuaian

indikator yang berorientasi outcome/dapat terukur; dan penyesuaian kegiatan dengan fokus intervensi pada SOP, SDM, dan Pengawasan, Teknologi dan Inovasi pada RB Tematik.

Menyusun Rancangan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 Ditjen Perikanan Budi Daya.

3.3. Efisiensi

Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran DJPB belum bisa dilakukan penghitungan dikarenakan data realisasi keuangan pada aplikasi SMART kementerian keuangan belum tersedia.

3.4. Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran APBN 2026 pada Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp1.934.134.658.000,- kemudian terdapat kebijakan Efisiensi Anggaran sehingga alokasi anggaran efektif menjadi Rp1.174.369.398.000,- yang kemudian terdapat pengurangan Efisiensi Anggaran sehingga anggaran efektif yang dapat digunakan oleh Ditjen Perikanan Budi Daya menjadi sebesar Rp1.225.282.235.000,-. Berdasarkan data alokasi anggaran efektif dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sampai dengan triwulan I tahun 2026, realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya telah tercapai sebesar Rp125.651.763.715,- (10,25%) dari alokasi anggaran efektif, meningkat secara nilai dan persentase bila dibandingkan tahun 2025 pada triwulan yang sama yaitu sebesar 9,08%. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya triwulan I tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

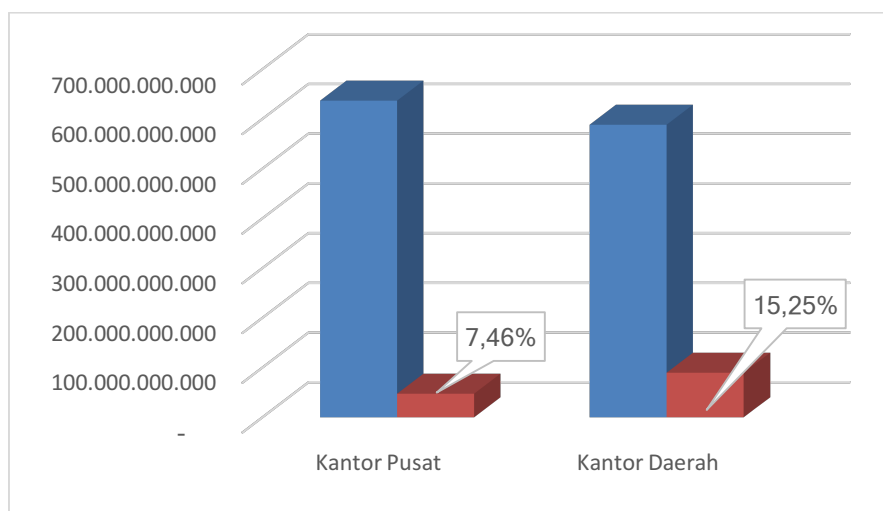
Tabel 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2026 dan 2025

TAHUN ANGGARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
2026	1.225.282.235.000,-	125.651.763.715,-	10,25
2025	949.424.654.000,-	86.160.470.414,-	9,08

Pembagian alokasi pagu anggaran Ditjen Perikanan Budidaya tersebut menurut jenis belanja yaitu : (i) Belanja Pegawai sebesar Rp199.890.284.000,-; (ii) Belanja Barang sebesar Rp504.850.368.000,-; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp244.684.002.000,-.

Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025 dan 2026

JENIS BELANJA	TW I TAHUN 2025			TW I TAHUN 2026		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pegawai	199.890.284.000	47.187.713.325	23,61	234.145.899.000	52.031.416.503	22,22
Barang	504.850.368.000	38.972.757.089	7,72	887.948.838.000	55.740.551.557	6,28
Modal	244.684.002.000	-	0,00	103.187.498.000	17.879.795.655	17,33
Total	949.424.654.000	86.160.470.414	9,08	1.225.282.235.000	125.651.763.715	10,25



Gambar 8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terbesar yaitu pada Satker Kantor Daerah (15,25%), sedangkan yang terendah yaitu pada Satker Kantor Pusat (7,46%) sebagaimana berikut

1. Satker Pusat

Realisasi anggaran pada satker Pusat sebesar 7,46 %, dengan adanya aturan satu dipa maka satker pusat seluruhnya tergabung dalam satu satker.

2. Satker UPT

Realisasi anggaran pada satker UPT keseluruhan sebesar 15,25%, dengan capaian terbesar terdapat pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang 28,06% dan terendah pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang 6,7

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan

Secara keseluruhan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan budidaya akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan Budidaya yang berkelanjutan.

Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya diperlukan beberapa rencana aksi memaksimalkan penyerapan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan strategis agar penyerapan anggaran triwulan berikutnya lebih

